

---

## PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BALAI HARAPAN KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Antonius

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,  
Sintang, Indonesia, email: [antoniusunka@gmail.com](mailto:antoniusunka@gmail.com)

**Abstract:** *The objective of this study is to determine and describe the implementation of community participation in development in Balai Harapan Village, Tempunak District, Sintang Regency, including: participation in development planning, participation in development implementation, participation in development supervision, and participation in the utilization and maintenance of village development. The method used is descriptive research with a qualitative approach. The subjects of this study consisted of the Balai Harapan Village Head, the Village Secretary, the Head of Development, and members of the Balai Harapan Village community. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation studies. Data analysis used qualitative descriptive analysis methods. The results of this study indicate that participation in development planning is implemented through a village development planning deliberation mechanism involving all elements in Balai Harapan Village. Participation is implemented only through contributions of labor and attendance at village meetings. Development supervision has not been implemented according to existing standards and procedures, limited to input and suggestions. Community awareness of maintaining village development assets is still low, as many development projects are often undertaken without community involvement in their preparation.*

**Keywords:** *Implementation; Participation; Community*

**Abstrak:** Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yang mencakup: Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam pengawasan pembangunan dan partisipasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa Balai Harapan, Sekertaris Desa, Kaur Pembangunan dan dari unsur masyarakat Desa Balai Harapan. Teknik dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan semua unsur di Desa Balai Harapan. Pelaksanaan partisipasi hanya melalui sumbangan tenaga, kehadiran dalam pertemuan desa. Pengawasan pembangunan belum dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang ada, hanya sebatas masukan dan saran. Kesadaran masyarakat dalam memelihara aset pembangunan desa masih kurang, dikarenakan banyak pembangunan yang dikerjakan seringkali tanpa banyak melibatkan masyarakat menyusunya.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan; Partisipasi; Masyarakat*

## PENDAHULUAN

Desa Balai harapan merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang, salah satu desa yang melaksanakan kegiatan pembangunan desa secara rutin setiap tahunnya. Oleh karena itu sebagai desa yang melaksanakan program pembangunan tidak lepas dari peran partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan maupun pemanfaatan dan pemeliharaan. Kegiatan masing-masing masyarakat yang sehari-hari sebagian mata pencaharian petani, peternak, pegawai, swasta dan sebagainya, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan di desa seperti kehadiran masyarakat dalam rapat yang diadakan belum sesuai dengan yang diharapkan, kehadiran dalam kegiatan gotong royong yang diadakan masih rendah. Sikap masyarakat yang kurang kritis dalam hal memberikan pendapat ataupun saran baik dalam mengungkapkan dan menyampaikan prakarsa seperti menyampaikan informasi permasalahan yang dihadapi, kurang memberikan masukan berupa saran-saran dan ide-ide dalam usaha pembangunan desa. Kurang terbukanya pemerintahan desa dalam proses perencanaan pembangunan, dan masih rendahnya upaya-upaya pemerintah desa dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program pembangunan yang diselenggarakan, sehingga masyarakat merasa

pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya. Persoalan lainnya yang dihadapi masyarakat Desa Balai Harapan adalah rendahnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berakibat program pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan Desa Balai Harapan tidak terwujud sepenuhnya sesuai harapan masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat sangat jarang dilakukan, padahal sangat penting karena bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam penentuan arah pembangunan dan pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan Desa Balai Harapan kedepannya. Semua kegiatan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat tersebut, belum diupayakan oleh pemerintahan Desa Balai Harapan baik dari segi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut dianggap masih sangat kurang, termasuk dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari tingkat kehadiran masyarakat dalam pertemuan tingkat desa masih rendah, keaktifan masyarakat dalam mengemukakan masukan, saran, usul masih kurang diupayakan. Konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Menurut Britha (2003:88) ada tiga alasan utama mengapa

partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal.. Menurut Burke, E.M. (2004:99) partisipasi masyarakat memiliki keuntungan sosial, politik, *planning* dan keuntungan lainnya. Tujuan utama partisipasi adalah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana; dan untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Menurut Rukminto (2008:145) menyatakan fungsi dari partisipasi masyarakat yaitu sebagai berikut: (1) partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan; (2) partisipasi masyarakat sebagai strategi; (3) partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi; (4) partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa; (5) partisipasi masyarakat sebagai terapi. Lebih lanjut Rukminto (2008:125) juga merangkum manfaat dari partisipasi masyarakat yaitu: Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala pikirannya dan mempertimbangkan kepentingan publik.

### **Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu negara. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sesuai dengan kewenangannya yang meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam masyarakat desa, perencanaan partisipatif merupakan sebuah instrumen yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif yang merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan tersebut di atas adalah tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di desa, meskipun demikian pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, anggaran terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat, pelebaran jalan atau pembebasan lahan.

Menurut Bintoro, T (1993:94) Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, di lanjutkan dengan Musrenbangdes di tingkat kecamatan, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritis mengandung banyak kelemahan. Musrenbangdes dalam

perjalanannya selama ini belum dapat diandalkan sebagai wadah yang berperan penting di desa. Alexander (2005:81) menyatakakan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain: (1) Keterlibatan dalam setiap proses pengambilan keputusan dari kegiatan pembangunan. (2) Kontribusi masyarakat setempat dalam setiap pekerjaan bangunan yang berbentuk tenaga kerja atau bahan bangunan setempat (3) Berbagai proyek yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (4) Konsultasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan misalnya pekerjaan bangunan pantai. Peran serta masyarakat dalam perencanaan akan menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dalam meningkatkan kualitas keputusan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat akan dapat ditangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan yang berguna dalam perumusan konsep, penentuan prioritas dan kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor. Menurut Bintoro, T (1993:23) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terlibat dalam empat hal yaitu: Partisipasi dalam perencanaan merupakan suatu rencana atau keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam masyarakat hanya dapat menyatakan untuk setuju tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Mengacu pada konsep diatas, maka partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pada hakikatnya harus meliputi penentuan tujuan oleh masyarakat sendiri dari serangkaian kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan dengan mempergunakan potensi sumber-sumber yang ada dimasyarakat sebaik mungkin yang kesemuanya itu disampaikan dalam rapat musyawarah. Menurut Bintoro. T. (1993:24) agar perencanaan program dapat berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip perencanaan program sebagai berikut: (1) Suatu program harus didasarkan pada kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat yang akan dikenai sasaran (2) Suatu program harus dimulai dengan perumusan tujuan yang jelas. (3) Suatu program harus menyertakan rencana evaluasi atau monitoring. (4) Suatu program yang dikenakan untuk masyarakat, harus mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. (5) Suatu program yang dirancang untuk jangka waktu yang relatif lama akan lebih efektif dibandingkan dengan program yang direncanakan dengan jangka waktu pendek. (6) Suatu kegiatan yang terprogram lebih efektif dibandingkan program yang dilakukan secara insidental. (7) Efektivitas dari pelaksanaan program tergantung pada seberapa jauh program tersebut sesuai dengan sistem nilai yang berlaku didalam masyarakat yang dikenai sasaran program.

### **Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak untuk secara sukarela menyumbangkan

tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Suatu daerah atau suatu masyarakat ingin maju dan pembangunan semakin baik maka peran dan partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan karena tidak akan mungkin pembangunan akan berjalan. Yadav (2013:82), mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan yang lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Menurut Bintoro, T (1993:116), bentuk-bentuk partisipasi meliputi: Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa; Sumbangan spontan berupa uang dan barang; Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari pihak ketiga; Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat;

Sumbangan dalam bentuk kerja; Aksi massa; Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga; Membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom. Adapun jenis-jenis partisipasinya meliputi: pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang; dan uang. Menurut Slamet, Y (1993:143), faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri.

### **Partisipasi Dalam Pengawasan Pembangunan**

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan seluruh kegiatan agar sesuai rencana tentu tergantung pada kinerja karyawan dalam bekerja, selanjutnya kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh pengawasan. Soelendro, A. (2008:55) Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan objek yang diperiksa. Menurut Sujamto (2003:77) pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana. Menurut

Sunarti (2003:127) berdasarkan bentuknya pengawasan dibedakan sebagai berikut : (1) Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri. (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Kusnadi, H. M. (2005:173) pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi yaitu :

(1) Pengawasan langsung yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. (2) Pengawasan tidak langsung yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Tugas

dan fungsi pengawasan menurut Selamat, Y. (2003:144) sebagai berikut (1). Mempertebal rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. (2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. (4) Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. Menurut Selamat, Y. (2003:123) teknik-teknik pengawasan sebagai berikut: Pengawasan pendahulu yakni dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan memiliki tahapan proses yang dapat jalani atau dilakukan adapun tahap proses pengawasan tersebut yaitu : (1) Tahap Penetapan Standar, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu : a. standar fisik. b. standar moneter c. standar waktu (2) Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat (3) Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. (4) Tahap

pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. (5) Tahap pengambilan tindakan koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

### **Partisipasi Dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pembangunan**

Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan meliputi: menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan, menjadikan atau mengusahakan suatu lapangan usaha, merawat secara rutin dan sistematis, mengatur kegunaan atau memanfaatkannya, mengusahakan dan mengamatkannya serta mengembangkan. Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan berarti mendukung kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia keadilan sosial dan memelihara alam sebagai lingkungan manusia untuk generasi yang akan datang. Manullang.M. (2005:15-20) menyatakan bahwa keinginan masyarakat untuk berpartisipasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam berpartisipasi: (1) Hasil dari keterlibatan, artinya dalam berpartisipasi seseorang tidak akan antusias dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan jika dia merasa bahwa partisipasi tidak mempunyai

akibat bermakna pada hasil akhirnya. (2) Adanya kepentingan khusus yang berpengaruh secara langsung. Masyarakat akan bersedia berpartisipasi jika individu tersebut merasa terkait (terlibat) dan mendapatkan keuntungan baik sebagai individu maupun kelompok dimana ia menjadi anggotanya sesuai keinginan dan kebutuhan mereka yang dapat dirasakan manfaatnya. Menurut Soelaiman (2005:15-20) terdapat dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yakni: a) Partisipasi bebas dan b) Partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela didalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain. Sedangkan partisipasi terbujuk adalah jika seseorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok tertentu. Adapun partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan terpaksa keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dengan derajat pemaksaan yang

berbeda-beda, misalnya anggota masyarakat wajib memelihara fasilitas sosial dan utilitas umum, hal ini tertuang didalam peraturan/ instruksi menteri dalam negeri. Partisipasi terpaksa karena kondisi ekonomi terjadi bila seseorang yang tidak turut didalam suatu kegiatan akan mendapatkan kesulitan dalam aspek sosial ekonomi, misalnya bila seseorang tidak turut serta dalam pemeliharaan prasarana lingkungan di kampungnya maka ia akan disisihkan dari pergaulan tetangganya.

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dianalisis serta berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti serta berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut: (1). Teknik studi kepustakaan dan (2) Teknik studi lapangan yang terdiri dari teknik observasi, wawancara. Penelitian dilaksanakan di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Balai

Harapan yang terlibat langsung dalam menyusun formulasi perencanaan pembangunan desa. Penentuan subjek dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Sesuai dengan namanya *purposive sampling* diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa subjek penelitian yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Desa Balai Harapan, Sekretaris Desa, Anggota Badan permusyawaratan Desa, kepala Wilayah dan Masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif menggunakan rancangan model interaksi Miles dan Huberman (2014:123) mencakup: analisis kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*. Miles dan Huberman (2014:123) menggambarkan model analisis datanya sebagai berikut: (1) Pencarian Data. Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Kondensasi data dilakukan dengan menulis ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, menghasilkan kategori, dan penulisan analitis memo. Proses kondensasi data

berlanjut setelah *fieldwork* berakhir sampai laporan selesai. Kondensasi data untuk mempertajam, mengurutkan, berfokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa bahwa "final" kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. (2) Penyajian Data . Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi, dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Penyajian data dapat mengambil berbagai bentuk yaitu teks naratif, dan matriks, grafik, jaringan, dan bagan. (3) Penarikan Kesimpulan. Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan

verifikasi, yang dilakukan mulai dari permulaan pencaharian data, arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, sehingga makna dan data yang muncul harus diuji kebenaran, kekokohan, kecocokan serta validitasnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan, bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program hingga pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan desa. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, musrenbang Desa Balai Harapan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa Balai Harapan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Balai Harapan ini akan menjadi bahan dalam menyusun rencana kerja pemerintahan Desa.

Bentuk peranserta masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah melalui perwakilannya diminta pemikiran saran dan pendapat untuk nantinya dipaparkan di dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Masyarakat juga ikut mengawal proses pengusulan kegiatan pembangunan desa sampai ke tingkat kabupaten. Peran serta masyarakat juga ditunjukkan dalam keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan seperti kegiatan gotong royong dalam pengerjaan jalan gang meskipun masih belum optimal. Masyarakat Desa Balai Harapan melalui perwakilannya beberapa kali diundang dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan baik di tingkat desa dan kecamatan dan bahkan terkadang di Kabupaten Sintang.

## Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, baik itu jalan, jembatan dan pembangunan fisik bangunan maupun kegiatan dibidang perkebunan juga mencakup dalam perencanaan. Program pembangunan

Tabel 4.1. Rencana Pembangunan Balai Harapan Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Realisasi Program/ Kegiatan
1	Gedung Posyandu Desa	1 Unit
2	Pembuatan Pagar TK	2 Unit
3	WC (SD)	2 Unit
4	Rumah Dinas Tenaga Medis	1 Unit
5	Jalan Gang Desa Balai Harapan	4 Unit
6	Kantor Desa Balai Harapan	1 Unit
7	Pos Kambling	4 Unit

Sumber: Kantor Desa Balai Harapan, tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.1. tersebut bahwa banyak usulan yang dikerjakan oleh pemerintah seperti, gedung posyandu desa 1 unit, pembuatan pagar TK 2 unit, rehabilitas jembatan 3 unit, Wc SD 2 unit, rumah dinas tenaga medis 1 unit, jalan gang desa balai harapan 4 unit, kantor desa balai harapan 1 unit, pos kambling 4 unit. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Musrenbang Desa adalah mengagendakan kegiatan musrenbang Desa dalam rencana kerja pemerintah daerah dianggarkan oleh Bappeda Kabupaten Sintang dengan membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa berdasarkan Keputusan Bupati. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil musrenbang Desa Balai Harapan dengan program-program sektoral oleh berbagai Dinas/Instansi

tersebut tertuang dalam rencana kerja desa yang di dalamnya memuat tujuan, bahan dan program. Lebih jelas berkaitan dengan rencana pembangunan yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam tabel 4.1. berikut:

terkait di Kabupaten melalui rapat teknis tingkat Kabupaten. Perwakilan masyarakat diberikan kesempatan untuk memaparkan masalah-masalah prioritas dan mengajak peserta rapat untuk menyampaikan tanggapan, masukan, saran, dan pemikiran terhadap isu-isu program/kegiatan pembangunan desa dengan merujuk kepada informasi dari para narasumber. Terkait peserta dalam Musrenbang pemerintah desa Balai Harapan menentukan 46 undangan yang disebar untuk peserta yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa tingkatan kehadiran masyarakat sudah mengalami peningkatan seperti yang diuraikan dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Kehadiran Lembaga-lembaga Desa dan Masyarakat dalam Musrenbang Desa Balai Harapan tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah yang hadir
1	DPRD	1
2	Perangkat Desa	8
3	Kepala Dusun	2
4	Ketua RT	13
5	BPD	5
6	Tokoh Agama	4
7	Tokoh Adat	1
8	Hansip	4
9	Pendamping Desa	1
10	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	2
11	Posyandu	1
12	Masyarakat Desa Balai Harapan	8
	Jumlah	50

Sumber: Kantor Desa Balai Harapan tahun 2025

Berdasarkan data dalam tabel 4.7. di atas, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Balai Harapan tidak lain adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa melalui kehadirannya di pertemuan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh desa benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga. Hasil wawancara dengan masyarakat mengatakan bahwa sebagian besar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan masih secara elitis dan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa tanpa banyak melibatkan masyarakat. Pemerintahan desa sudah

melibatkan masyarakat melalui mekanisme “Musrenbangdes”, namun belum semua komponen masyarakat diundang dalam “musrenbangdes” tersebut hadir dikarenakan sangat sulit mengumpulkan masyarakat. Dampak dari perencanaan pembangunan yang belum bersifat partisipatif adalah manfaat pembangunan desa belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga program pembangunan belum dapat disebut berhasil.

Pembangunan desa Balai Harapan pada tahun 2020 diarahkan pada peningkatan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur perdesaan, untuk mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2020. Secara lebih rinci, kebijakan tersebut meliputi: Penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian yang

memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya antara lain melalui pengembangan kawasan perkebunan dan pertanian desa. Peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara lain berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerjasama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha.

Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan yang kuat. Peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan/atau pemeliharannya, antara lain: jalan perdesaan, jembatan, lapangan olah raga, tempat ibadah dan sarana sumur bor. Lebih jelas proses Musrenbangdes di Desa Balai Harapan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini:

Tabel 4.3. Proses Musrenbangdes Balai Harapan Tahun 2020

No	Informasi Proses Musrenbangdes Tingkat Desa Kecamatan Tempunak	Frekuensi	Bentuk	Sasaran
1	Pengumuman kepada masyarakat mengenai proses Musrenbang Tingkat Desa Kecamatan Tempunak untuk menyusun RKPD	1 kali dalam 1 tahun	Pengumuman di Kantor Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak	Seluruh warga masyarakat
2	Penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti penting Musrenbang Tingkat Desa untuk menyusun RKPD	1 kali dalam 1 tahun	Rapat di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak	Seluruh warga masyarakat
3	Undangan kepada warga masyarakat untuk membicarakan Musrenbang Tingkat Desa Kecamatan Tempunak untuk menyusun RKPD	1 kali dalam 1 tahun	Rapat di Desa Balai Harapan Kecamatan Tempunak	Ketua RT dan tokoh masyarakat

Sumber : Kantor Desa Balai Harapan, Desember 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.3. di atas, dapat diketahui bahwa upaya pemerintah Desa Balai Harapan dalam memberikan informasi proses

musrenbang tingkat Desa Balai Harapan untuk menyusun rencana kerja perangkat desa masih sangat minim. Pengumuman kepada masyarakat

tentang proses Musrenbang tingkat Desa untuk menyusun rencana kerja perangkat desa, penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti penting musrenbang tingkat Desa untuk menyusun rencana kerja perangkat desa serta undangan kepada warga masyarakat untuk membicarakan musrenbang tingkat Desa Balai Harapan untuk menyusun rencana kerja perangkat desa hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja. Kegiatan mulai dari musyawarah dusun/Rw/kelompok adalah: daftar masalah dan kebutuhan; gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/kelompok untuk diajukan ke musrenbang Desa Balai Harapan wakil dusun/RW/kelompok yang akan hadir dalam kegiatan musrenbang Desa Balai Harapan (jumlah Wakil masing-masing dusun/RW/kelompok disesuaikan dengan kondisi setempat). Proses musrenbangdes tingkat Desa Balai Harapan untuk menyusun perencanaan kegiatan desa secara partisipatif sebenarnya telah mensyaratkan adanya keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Balai Harapan mengatakan bahwa mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan desa menganut pola perencanaan pembangunan dari bawah atau *bottom up planning* yang memberikan ruang adanya peranserta pihak-pihak yang ada termasuk dari kecamatan dan desa atau Desa Balai Harapan. Peserta musrenbang Desa untuk menyusun rencana kerja pembangunan desa adalah

perwakilan dari masyarakat yang berada di Desa Balai Harapan, seperti: Ketua RT/RW; Kepala Dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, Komite Sekolah dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat Desa Balai Harapan mengaku jarang dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan tidak diikutkan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa. Pelibatan masyarakat desa memiliki tiga alasan utama dalam perencanaan yaitu: pertama sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Kedua sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat. Ketiga, masyarakat memperoleh hak untuk urun rembuk dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan.

### **Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi masyarakat, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral dan penting dalam proses dinamika pembangunan. Oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah, tetapi juga ditangan masyarakat. Keterlibatan

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan langkah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan demokratis dimana masyarakat diberikan kebebasan dan kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya. Sejalan dengan prinsip di atas, partisipasi masyarakat di Desa Balai Harapan belum dapat berjalan dengan baik, sehingga hasilnya pun juga belum mampu mensejahterakan masyarakat setempat. Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa sudah berupaya

bersifat terbuka dengan memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaannya. Selama ini sudah terbangun beberapa infrastruktur fisik yang seluruhnya melibatkan masyarakat meskipun belum semuanya aktif hadir dalam proses pengerjaannya. Infrastruktur tersebut mencakup jalan Desa, jalan Dusun, jembatan dan Poskamling sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4. Pembangunan Infrastruktur di Desa Balai Harapan Periode 2024

No	Tahun	Bentuk Kegiatan	Nilai Proyek
1	2020	Kantor Desa Balai Harapan	Rp. 269.816.800
2	2020	Jalan Gang Desa Balai Harapan	Rp. 207.506.000
3	2020	Pembangunan Pos Kamling	Rp.6.525.000.00

Sumber: Kantor Desa Balai Harapan, tahun 2025

Berdasarkan data dalam tabel 4.4. di atas bahwa pembangunan infrastruktur desa sudah melalui musyawarah di tingkat desa berdasarkan pembahasan hasil pemetaan masalah dan potensi dari masing-masing RT dan dusun serta kelompok masyarakat juga menyepakati urutan daftar pembangunan berdasarkan penelaahan prioritas dan sesuai kemampuan dan kondisi keuangan Desa. Secara umum partisipasi masyarakat Desa Balai Harapan dalam pelaksanaan pembangunan desa masih sebatas dalam bentuk kegiatan sosial gotong royong dengan menjaga kebersihan desa, dan pembangunan jalan gang sebagian berpartisipasi jika masyarakat di informasikan sebelumnya.

Keterlibatan langsung masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan dalam proses pembangunan perlahan sudah mulai mengalami penurunan. Warga memang diberikan ruang untuk menyampaikan ide-ide terkait pembangunandan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa berada pada kategori belum sepenuhnya aktif. Masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi berupa masalah komunikasi. Kesadaran masyarakat, dan komunikasi yang terjalin masih perlu diingkatkan lagi karena saat ini kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat belum optimal. Masih terdapat sebagian

warga desa yang meskipun telah diajak langsung, dan telah disosialisasikan untuk ikut berpartisipasi, tetapi mereka tetap lebih memilih untuk bekerja, dan ada juga yang mengatakan bahwa anggaran setiap pembangunan dari pemerintah sudah ada yaitu dana Desa. Berdasarkan fakta tersebut tentunya ada faktor internal, yang cukup mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan pengalaman berkelompok. Faktor eksternal, yaitu hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan individu yang dapat mempengaruhi partisipasi. Masyarakat akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, bila didukung dengan pelayanan pengelolaan kegiatan yang positif dan tepat maka warga masyarakat tidak akan ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, *needs*, *rewards*, dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana, dan prasarana.

### **Partisipasi Dalam Pengawasan Pembangunan**

Masyarakat lokal memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pembangunan desa karena kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat yang nantinya menanggung akibat pelaksanaan pembangunan termasuk kegagalan atau dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan desa. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan pun harus diberikan juga kepada masyarakat lokal. Parameter partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah keterlibatan dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki. Keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan desa terlihat minim, dan masyarakat lebih memilih diam. Alasannya, karena perencanaan pengembangan dilakukan oleh pemerintah lebih dominan secara *top-down*, sehingga masyarakat tidak berkompotensi untuk melakukan pengawasan, di samping itu pengawasan oleh masyarakat dimaknai oleh pemerintah sebagai tindakan mengawasi program yang dilakukan pemerintah, sehingga berujung terjadinya konflik. Pada akhirnya, masyarakat memilih berpartisipasi pada pengawasan yang bersifat preventif untuk mencegah tindakan-tindakan negatif yang dapat mengganggu keamanan desa. Selama ini pengawasan yang bersifat kompleks hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat yang kritis termasuk tokoh masyarakat lokal. Pemantauan eksternal sebagai

sarana untuk melakukan kontrol, sehingga diharapkan dapat diperoleh input bagi perbaikan. Pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa masih lemah, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Pengawasan masyarakat masih berada pada tingkat memantau dan menilai, belum sampai melaporkan hasil pemantauan dan penilaiannya dan tidak ada standar yang digunakan dalam partisipasi pengawasan pembangunan.

### Partisipasi Dalam Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pembangunan

Hal-hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pembangunan desa yaitu belum adanya teladan kepemimpinan dari Pemerintahan Desa Balai Harapan itu sendiri. Sikap kepedulian sosial pemerintah Desa masih sangat rendah

Tabel 4.5. Data Sarana Pembangunan di Desa Balai Harapan

No	Jenis Sarana Prasarana Desa	Luas/Jumlah
1	Jalan Gang	4 Jalan
2	Kantor desa balai harapan	1 Kantor
3	Posyandu	1 Unit
4	Pos kambling	4 Unit
5	Pagar TK	1 Unit

Sumber: Kantor Desa Balai harapan, tahun 2025

Berdasarkan tabel 4.5. diatas bahwa terdapat beberapa jenis sarana pembangunan desa yang ada terdiri atas jalan gang dan kantor Desa Balai Harapan, Hasil wawancara dengan Kepala Desa Balai Harapan mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana belum menunjukkan rasa kepedulian yang tinggi dengan alasan bahwa pembangunan

dan belum mampu mempengaruhi masyarakat lewat komunikasi dan koordinasi yang seharusnya dibangun lebih inten. Pemerintahan Desa belum sepenuhnya memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam memprioritaskan pembangunan desa. Pemeliharaan prasarana desa belum terimplementasi dengan baik dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi masih sangat rendah. Masyarakat belum banyak memahami dan mengerti tugas dan tanggungjawabnya sebagai warga masyarakat yang menerima langsung manfaat pembangunan desa. Hal tersebut akhirnya berpengaruh terhadap peran masing-masing masyarakat dalam pemeliharaan prasarana tidak berjalan dengan baik. Lebih jelas berkaitan dengan saran pembangunan di Desa Balai Harapan dapat dilihat dalam tabel 4.5 dibawah ini:

selama ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga semangat berpartisipasi dan partisipasi masyarakat kurang. Jika prasarana yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka cenderung masyarakat akan memelihara prasarana yang tersebut. Dalam pemeliharaan prasarana pembangunan desa belum bisa terlaksana baik disebabkan belum

terciptanya manajemen pemerintahan desa berdasarkan harapan masyarakat. Permasalahan tersebut bisa diatasi dengan menekankan pada pencarian tokoh-tokoh di masyarakat yang memiliki pengaruh atau keteladanan, agar nantinya dapat mendukung keberhasilan program. Perlu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat agar program pembangunan dapat diterima oleh masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga dalam pengambilan keputusan, sehingga nantinya timbul rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui musrenbang desa. Masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas pembangunan desa.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui keikutsertaan kegiatan desa, dan gotong royong maupun kegiatan dalam bentuk dukungan pemerintahan desa lainnya.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan melalui penyampaian saran dan pemantauan

terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan Desa masih sangat rendah khususnya dalam hal pemeliharaan hasil pembangunan. Hal tersebut sangat beralasan karena pembangunan yang dibuat oleh pemerintah Desa lebih banyak bukan merupakan usulan dan harapan masyarakat desa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat terlaksanakan, maka harus ada pendekatan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Target pembangunan desa hendak disesuaikan dengan kondisi kemampuan, dan potensi yang ada di desa tersebut.
2. Supaya masyarakat aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, maka pemerintahan Desa Balai Harapan harus meningkatkan sosialisasi, dan terus membangun interaksi sosial terhadap masyarakat.
3. Pengawasan pembangunan sangat mutlak diupayakan, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan ketidaktepatan dalam pelaksanaan pembangunan. Agar masyarakat mau terlibat dalam pengawasan, maka program pembangunan desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan

pemeliharaan pembangunan desa, maka pemerintah Desa Balai Harapan harus memprioritaskan usulan dan keinginan masyarakat. Masyarakat harus selalu diberikan pemahaman dan penting menumbuhkan kesadaran dalam hal rasa memiliki dengan terus membangun komunikasi yang intens dengan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemahan Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bintoro, T. 1993. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung
- Burke, E.M. 2004. *Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota*. Terjemahan Puji Lestari, Dewi Mayangsari, dan Sely Martini. Bandung: Penerbit Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Kusnadi, H. M. 2005. *Manajemen Pengawasan Bagi Yang Diperiksa, Menyikapi Fungsi Pengawasan Dan Temuan*. Jakarta: BP. Panca Usaha
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metoda-Metoda Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit UI Press
- Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soelendro, A. 2008. *Mengefektifkan Pengawasan Dan Penindakan (Sanksi) Tegas Hasil Temuan Pemeriksaan*. Jakarta: BPK RI.
- Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soelaiman. 2005. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok*. Jurnal Tata Loka Volume 5, No. 1, Januari 2003.
- Yadav. 2013, *Kebijakan Pengawasan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa